



PROYEKSI PEREKONOMIAN INDONESIA
PASCA PERUBAHAN KEPEMIMPINAN AMERIKA SERIKAT
(Indonesian Economic Projections
Post Change in The United States Leadership)

DEDY JUSNAR HENDRAWAN¹, MEGAWARNI SIMAMORA², NETY NURDA³, SYUBHAN
MARTAWIGUNA⁴

¹ Direktur Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI,

² Kasubdit Geoekonomi Lemhannas RI,

³ Analis Kebijakan Ahli Muda Lemhannas RI,

⁴ Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama Lemhannas RI

Email: jian.ekonomi@gmail.com, Telepon (021) 3832325-24

ABSTRAK. Amerika Serikat (AS) diharapkan dapat kembali menjadi aktor utama politik dunia dibawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS mengambil arah kebijakan luar negeri unilateralisme sehingga AS sering terlibat perselisihan dengan sekutu-sekutu AS. Dibawah kepemimpinan Biden, AS mengambil arah kebijakan luar negeri multilateralisme yang menekankan pada diplomasi. Sehingga harapan untuk meningkatkan potensi kerja sama Indonesia-AS akan semakin banyak, seperti penguatan nilai mata rupiah, peningkatan investasi di sektor ekonomi, industri alat kesehatan, dan sektor pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya antisipatif terhadap dampak perubahan kebijakan ekonomi yang akan diterapkan dan proyeksi perekonomian Indonesia pada era kepemimpinan Biden melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis dilakukan secara substansial dan fokus pada masukan mengenai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap prospek pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Hasil kajian ini merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerjasama bilateral, transfer teknologi, kebijakan *intellectual property rights* (IPR), dan *crude palm oil* (CPO), serta mengantisipasi tingkat suku bunga *the Fed*. Langkah-langkah antisipatif terhadap implementasi proses produksi industri, investasi dan ekspor yang memperhatikan unsur-unsur HAM, demokrasi dan lingkungan serta memperbaiki iklim usaha secara konsisten dan insentif terhadap *Limited Trade Deal* (LTD) antara RI-AS juga perlu menjadi perhatian.

Kata kunci: Proyeksi Perekonomian, Kebijakan, Presiden AS

ABSTRACT. *The United States (US) is expected to return to be the main actor of world politics under the leadership of President Joe Biden. Because during the leadership of President Donald Trump, the U.S. pursued a unilateralism foreign policy, the country frequently clashed with its allies. The United States followed a multilateralist foreign policy focusing on diplomacy under Biden's leadership. So that the hoped-for increase in the potential of Indonesia-US partnership, such as strengthening the rupiah's value, expanding investment in the economic sector, the medical device industry, and the defense sector, might well be fulfilled. This paper intends to assess anticipatory efforts to the influence of economic policy changes that will be implemented and projections of the Indonesian economy in the era of Biden's leadership through focus group discussion (FGD). The analysis is substantial and focuses on policy initiatives that will have an influence on Indonesia's economic development and recovery prospects in the future. According to the result of this research, the Indonesian government should strengthen bilateral collaboration, technology transfer, intellectual property rights (IPR), and crude palm oil (CPO) regulations, as well as anticipate the Fed's interest rate. Anticipatory steps toward the implementation of industrial production, investment, and export processes that consider human rights, democracy, and the environment, as well as consistently improve the business climate, and the Limited Trade Deal (LTD) between Indonesia and the United States should be considered.*

Keywords: Economic Projection, Policy, US President

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2020 yang dilaksanakan pada 3 November 2020 telah menghasilkan pemenang, yaitu Joe Biden dari Partai Demokrat, mengalahkan Donald Trump, calon *incumbent* dari Partai Republik (Kompas, 8 November 2020). Kemenangan diraih Biden setelah memperoleh lebih dari 270 suara elektoral (*electoral votes*) sebagai syarat minimal untuk memenangkan pilpres AS (cnn. com., 8 November 2020). Dalam pilpres AS, kandidat dinyatakan menang jika sudah meraih 270 suara elektoral, adapun total suara elektoral ialah 538.

Pilpres AS yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali menarik untuk diikuti perkembangannya, tidak saja bagi masyarakat AS tetapi juga masyarakat internasional, karena dari sini akan hadir Presiden AS berikutnya yang kebijakannya bisa memengaruhi dunia.

Sebagaimana janji kampanyenya, *President Elect*, Joe Biden, setelah pelantikan pada awal Januari 2021, akan membawa kembali AS pada keputusan Konferensi Perubahan Iklim PBB yang telah disepakati di Paris pada 2015. Sebelum ini, pada era pemerintahan Trump, AS meninggalkannya dengan menarik diri tiba-tiba dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai salah satu negara penghasil emisi karbon (CO₂) terbesar di dunia. Tekad kuat Biden pada isu lingkungan akan berpengaruh signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim global, antara lain kebakaran hutan yang marak terjadi

belakangan, termasuk di AS.

Menurut Dr. Reza Yamora Siregar, Ph.D. (FGD di Lemhannas RI, 2021), dalam waktu 2-3 tahun ke depan, kemungkinan dampak dari *Biden's administration economic policies* terhadap *global economic environment* masih relatif terbatas. Hal ini utamanya disebabkan:

- a) Penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi global masih menjadi prioritas.
- b) Adanya kebijakan *Buy American* untuk '*reshoring of manufacturing*', pasar kerja (pengangguran), dan meningkatkan neraca perdagangan.
- c) Kembali ke sistem berbasis 'aturan global' yaitu penggunaan insentif/ subsidi, bukan hambatan tarif dan non-tarif.
- d) Amerika Serikat tidak akan memasuki perjanjian perdagangan baru dan akan berfokus pada investasi besar di dalam negeri.

Para pemimpin dunia, terutama dari negara-negara sekutu tradisional AS di Eropa, menyambut hangat terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS ke-46. Mereka berharap kerjasama internasional dalam berbagai bidang akan pulih setelah era yang penuh gejolak dalam politik luar negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Para pemimpin dunia melihat terpilihnya Biden memberi kesempatan untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai persoalan krusial, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, perubahan iklim, hingga pemulihan kembali pendekatan multilateralisme

dalam diplomasi internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh masukan mengenai perubahan kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi yang akan diterapkan oleh Joe Biden setelah menjadi Presiden Amerika Serikat untuk prospek pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu, adanya upaya antisipatif terhadap dampak perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh Joe Biden.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian melalui acara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar terkait, baik dari unsur pemerintahan, akademisi, swasta, maupun masyarakat. Analisis proses menggunakan Metode Penelitian Studi.

Kemudian menurut (Nazir, 1998) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari bahan paparan narasumber yang disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Lemhannas.

Metode Pengumpulan Data

Secara terinci metode pengumpulan data dilakukan melalui FGD (*Forum Group Discussion*). Pelaksanaan FGD dimaksudkan untuk

mengeksplorasi berbagai data dan fakta dari para narasumber dan penanggap. Melalui FGD ini diharapkan mendapat berbagai kritik, saran, dan masukan guna kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi. Selain itu juga, diharapkan mendapatkan masukan untuk memperkaya pemikiran, ide, gagasan, maupun konsep sebagai bahan *policy recommendation* untuk Presiden RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis dilakukan secara substansial dan fokus pada masukan mengenai perubahan kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi yang akan diterapkan oleh Joe Biden setelah menjadi Presiden Amerika Serikat, terutama dampaknya terhadap prospek pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Selain itu, adanya upaya antisipatif terhadap dampak perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh Joe Biden.

Kemungkinan, realisasi kebijakan stimulus fiskal yang besar yang dijanjikan Joe Biden nantinya akan menekan nilai tukar dolar terhadap mata uang asing, termasuk rupiah sehingga menguntungkan Indonesia. Pelemahan mata uang dolar tentu menjadi insentif untuk mendorong ekspor karena harga-harga komoditas Indonesia menjadi lebih murah daripada harga barang-barang yang ada di Amerika Serikat (Reza Yamora Siregar, 2021).

Beberapa implikasi kemenangan Joe Biden

secara garis besar adalah (Gita Wiryawan, 2021):

- a) Stimulus fiskal skala besar
- b) Perdagangan dan kebijakan luar negeri yang lebih dapat diprediksi, mendukung aset pasar berkembang dan sentimen risiko yang lebih luas dalam jangka pendek
- c) Pengeluaran untuk investasi publik seperti infrastruktur hijau (*clean energy*, transportasi dan perumahan)
- d) Fokus pada kebijakan iklim dengan bergabung kembali di *Paris Agreement* untuk mencapai tujuan pengurangan emisi
- e) Pergeseran dalam investasi berkelanjutan melalui perluasan kredit pajak untuk sumber daya terbarukan
- f) Peningkatan hasil nominal dan inflasi karena pajak yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat akan mengarah pada investasi ekuitas yang lebih tinggi
- g) Pajak akan berpengaruh pada koreksi angka modal dan akan berkonsentrasi cukup besar
- h) Antisipasi regulasi perilaku di kalangan perusahaan teknologi yang bermonopoli atau mungkin berkonsolidasi antar perusahaan-perusahaan besar.

Pemerintahan Joe Biden akan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Cina termasuk Indo-Pacific secara kompetitif tetapi tidak menimbulkan konfrontatif. Begitu juga, Biden akan menjalin hubungan multilateral yang lebih baik dan membawa lingkungan bisnis yang lebih stabil sekaligus memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang selama ini

dirugikan oleh kepemimpinan Trump. Akan timbul harapan, Joe Biden akan memberikan peluang dan optimisme baru bahwa kerja sama multilateral yang selama ini telah menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dominan di dunia, akan menjadi prioritas (Gita Wiryawan, 2021).

Perbedaan besar antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Biden terletak pada cara pendekatannya. Bila Trump lebih menyukai pendekatan secara bilateral, maka Biden lebih memilih kerjasama yang bersifat multilateral. Keinginan Biden untuk mengembalikan AS sebagai negara anggota *Paris Agreement* merupakan salah satu contohnya. Biden mengatakan pemerintahannya akan membangun kerja sama dengan negara mitra dan sekutu serta negara-negara yang berpikiran sama di seluruh dunia.

Indonesia berharap Joe Biden mampu memberikan ketenangan dan kepastian geopolitik, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sangat membutuhkan kepastian politik dan stabilitas, terutama antara China dan AS. Apabila hubungan geopolitik antara China dan AS berhasil, maka hal ini akan berdampak pada kepastian dan ketenangan negara, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan Indo-Pasifik hingga ASEAN. Indonesia bagian dari ekonomi ASEAN, jika Indo-Pasifik aman maka kawasan ASEAN akan aman. Jika Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan yang terpenting ada optimisme. Hal ini pula

yang menjadi alasan mengapa banyak pihak di Indonesia mendukung Joe Biden sebagai Presiden AS.

Dengan naiknya Joe Biden sebagai Presiden AS yang baru, diharapkan akan mengubah gaya kepemimpinan AS sekaligus memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang selama ini dirugikan oleh kepemimpinan Trump. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, naiknya Biden akan memberi peluang dan optimisme baru bahwa kerja sama multilateral yang selama ini telah menjadikan AS sebagai negara dominan di dunia, akan menjadi prioritas. Di bawah Joe Biden, diharapkan AS tidak lagi menjadi sumber inspirasi bagi elemen masyarakat di berbagai negara untuk membangkitkan semangat ekstrim kanan dan rasialisme. AS di bawah Joe Biden diharapkan akan mengembalikan nilai-nilai untuk menghormati pluralisme, hak asasi manusia, dan tidak merendahkan suatu bangsa berikut peradabannya.

Topik prioritas untuk kerjasama internasional Amerika Serikat ke depan antara lain yaitu pemberantasan korupsi, penegakan demokrasi, perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan perubahan iklim.

Menurut I Gede Ngurah Swajaya, Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu RI dalam acara FGD di Lemhannas, fokus utama pada aspek perdagangan internasional, Joe Biden akan mengambil pendekatan yang lebih multilateralis, yakni:

- a) Bergabung kembali ke dalam Trans-Pacific Partnership, re-engagement kepada World Trade Organization (WTO) dan memanfaatkan APEC untuk mendorong ekonominya.
- b) Meninggalkan strategi dagang agresif oleh pemerintahan Trump untuk kembali merangkul mitra dagang utama Amerika Serikat, antara lain Meksiko dan Uni Eropa.
- c) Terkait hubungan dengan RRT, pemerintahan Biden akan menekan RRT agar mematuhi peraturan dagang internasional.

Terkait kawasan Asia atau Indo-Pasifik, Biden diperkirakan akan menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas *engagement* di masa depan, disamping memperkuat kembali *engagement* dengan Eropa dan mengedepankan "*Leadership, Cooperation, And Democracy*". Karena, Amerika Serikat akan berupaya perkuat komitmen dan peran aktif di ASEAN terutama melalui East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Regional Forum (ARF).

Pembahasan

Membaiknya ekonomi Amerika Serikat karena kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang menjadi prioritas utama Biden diprediksi mampu mendorong ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai negara dengan negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia perlu mempercepat dan menggalakkan penerapan kebijakan insentif fiskal secara agresif untuk mendorong kinerja ekspor



nasional. dengan cara memastikan kapasitas produksi industri dalam negeri, baik industri secara umum maupun UMKM, dalam memenuhi lonjakan permintaan ekspor tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan penerapan kebijakan stimulus fiskal dan non-fiskal secara agresif yang diperuntukkan bagi industri dan UMKM, baik berupa insentif pajak penghasilan, subsidi suku bunga, dan kebijakan fasilitas kepabeanan berupa simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor.

Kebijakan Joe Biden untuk menurunkan minimum tax bagi perusahaan di luar Amerika Serikat tentunya akan mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat berinvestasi di negara-negara berkembang. Indonesia diharapkan bisa menangkap peluang tersebut. Untuk bisa mendapatkan ketahanan investasi adalah melalui skema investasi langsung (*foreign direct investment/FDI*).

Dari sisi moneter, pemerintah Indonesia, terutama Bank Indonesia selaku otoritas kebijakan moneter, perlu mengantisipasi tingkat suku bunga *the Fed* yang berpotensi meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden. Kenaikan tingkat suku bunga *the Fed*, terutama akan mendorong terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) dari Indonesia yang dapat menekan nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga kebijakan Bank Indonesia dan kemudian berpengaruh terhadap arus modal bagi dunia

usaha dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini tentunya perlu diantisipasi oleh pemerintah di masa yang akan datang.

Pemerintah juga perlu mendorong pembahasan mengenai *Limited Trade Deal* (LTD) antara RI-AS. LTD merupakan bentuk kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, selain fasilitas pengurangan bea masuk atau *Generalized System of Preferences* (GSP). Skema perdagangan ini memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dan lebih permanen bagi pelaku usaha Indonesia. LTD akan memberikan fasilitas khusus bagi produk unggulan dan potensi ekspor Indonesia, khususnya dalam membentuk rantai pasok antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Kecenderungan Joe Biden yang sangat memperhatikan isu lingkungan hingga menghentikan semua subsidi bahan bakar fosil dan membatalkan lebih dari 100 kebijakan terkait dengan isu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya, tentu menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang masih tertinggal dalam hal teknologi industri yang ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal transfer teknologi dan pendidikan.

SIMPULAN

Proyeksi Perekonomian Indonesia memerlukan kebijakan dan langkah antisipatif terkait Pasca Perubahan Kepemimpinan Amerika

Serikat. Hal tersebut disusun menjadi tiga bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan berbagai arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Presiden Joe Biden.

Untuk kebijakan dan langkah antisipatif jangka pendek, Pemerintah Indonesia perlu segera meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih formal dengan Amerika Serikat, perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya *tapering off* atau *exit* dari stimulus yang kemungkinan akan dilakukan di awal 2022, meningkatkan kapasitas produksi industri dalam negeri untuk memenuhi lonjakan permintaan ekspor akibat pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, memberikan stimulus fiskal dan non-fiskal secara agresif bagi industri dan UMKM sehingga dapat mendorong ekspor nasional dan mendorong pembahasan mengenai *Limited Trade Deal* (LTD) antara RI-Amerika Serikat.

Sedangkan untuk kebijakan dan langkah antisipatif jangka menengah yaitu Indonesia perlu mengkomunikasikan secara intensif dan konsisten memperbaiki iklim berusaha dan siap menerima investor dari Amerika Serikat, mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan Joe Biden terhadap ekspor biofuel Indonesia dengan cara memasarkan dan mempromosikan secara masif produk kelapa sawit Indonesia, terutama *crude palm oil* (CPO), ke negara-negara lain selain Uni Eropa dan Amerika Serikat, lebih tegas terhadap pelanggaran perlindungan kekayaan intelektual

dan memperbaiki kebijakan terkait *intellectual property rights* (IPR) dan meningkatkan kerjasama transfer teknologi dengan Amerika Serikat.

Sementara untuk jangka panjang kebijakan dan langkah antisipatif adalah Pemerintah perlu mendorong implementasi proses produksi industri, investasi dan ekspor yang memperhatikan unsur-unsur HAM, demokrasi dan lingkungan, berperan sebagai penengah antara Amerika Serikat dan China dalam konflik di Laut China Selatan dan pengembangan industri vaksin domestik dan pusat epidemiologi nasional dalam jangka panjang perlu dikembangkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Swajaya, I. G. N. 2021. Pengaruh Perbedaan Gaya Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Terpilih Terhadap Konstelasi Geopolitik dan Geoekonomi Internasional. *Focus Group Discussion* Lemhannas RI.
- Wiryawan, G. I. 2021. Proyeksi Dampak Kepemimpinan Amerika Serikat yang Baru Terhadap Kemandirian Perekonomian Indonesia. *Focus Group Discussion* Lemhannas RI.
- Nazir, M. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nainggolan, P. P., Muhamad, S. V. 2020. Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 dan Implikasinya bagi Dunia. Kajian Singkat



- Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 21/I/Puslit/November/2020.
- Sihombing, L. 2021. Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Joe Biden. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021.
- Wangke, H. 2020. Prospek Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dan Negara-Negara Indo-Pasifik. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 22/II/Puslit/November/2020.
- Siregar, R. Y. 2021. Proyeksi Dampak Kepemimpinan Amerika Serikat yang Baru terhadap Perekonomian Indonesia: *Selected Perspectives. Focus Group Discussion* Lemhannas RI.
- Zed, M. 2008. Metodologi Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- “Presidential Elections Results and Electoral Map 2020”, *cnn.com.*, 8 November 2020, <https://edition.cnn.com/election/2020/>
- Sulaeman, F. H. & Tiara, N. S. 2021. Kebiasaan Baru Hubungan Internasional: Potensi Kebijakan Luar Negeri Joe Biden Terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas* Vol. 9 No. 1
- Rezki J. F., Alta A., & Revindo M. D. 2020. Trade and Industry Brief. Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI.
- “Biden dan Empat Tantangannya”, *Kompas*, 8 November 2020, hal. 4.
- Marsudi, R. L. P. 2021. “Harapan Pada Biden-Harris”, *Kompas*, 21 Januari 2021, hal. 6.
- Satria, L. 2020. “AS Resmi Keluar dari Kesepakatan Paris,” *Republika*, 6 November 2020, hal. 4.